



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARSONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN
3. NHK : 525577

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.233.000.000**

1. Tanah Seluas 180 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/30 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1995 m2 di DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 192.000.000
4. Tanah Seluas 1134 m2 di DEMAK, WARISAN Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 490 m2 di DEMAK, WARISAN Rp. 111.000.000
6. Tanah Seluas 2134 m2 di DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/75 m2 di DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 255.000.000
8. Tanah Seluas 157 m2 di DEMAK, LAINNYA Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 177.800.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MOBILIO E Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
4. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.465.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.329.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.436.594.000

III. HUTANG Rp. 258.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.178.594.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.